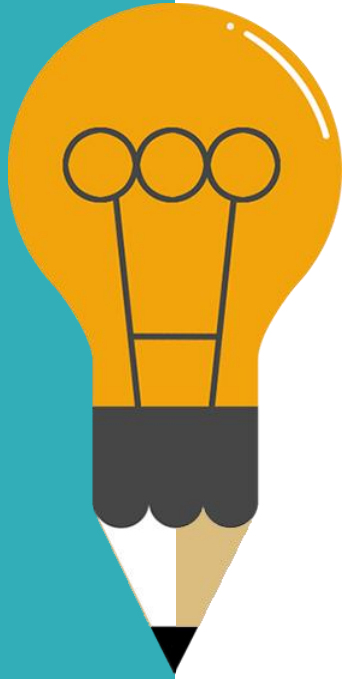


TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA 2017

Jakarta
Senin, 25 Februari 2017

Struktur Penyajian



01

Latar Belakang

02

Tujuan

03

Metodologi

04

Sumber Data dan Waktu
Pemantauan

05

Temuan



PENDAHULUAN

Latar Belakang



Informasi penanganan perkara korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum cenderung belum transparan. Pun jika ada data yang tersedia hanya berupa statistik akumulatif per tahun.





Tujuan

01

Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh institusi penegak hukum pada tahun 2017.

02

Mendorong transparansi data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK).

Metodologi

01

Melakukan pemantauan kasus korupsi di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka.

02

Pengumpulan data kasus korupsi yang telah dipublikasi oleh penegak hukum, baik melalui situs resmi atau melalui media massa.

03

Melakukan tabulasi atas kasus-kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW.

04

Membandingkan statistik pada semua parameter analisis.

05

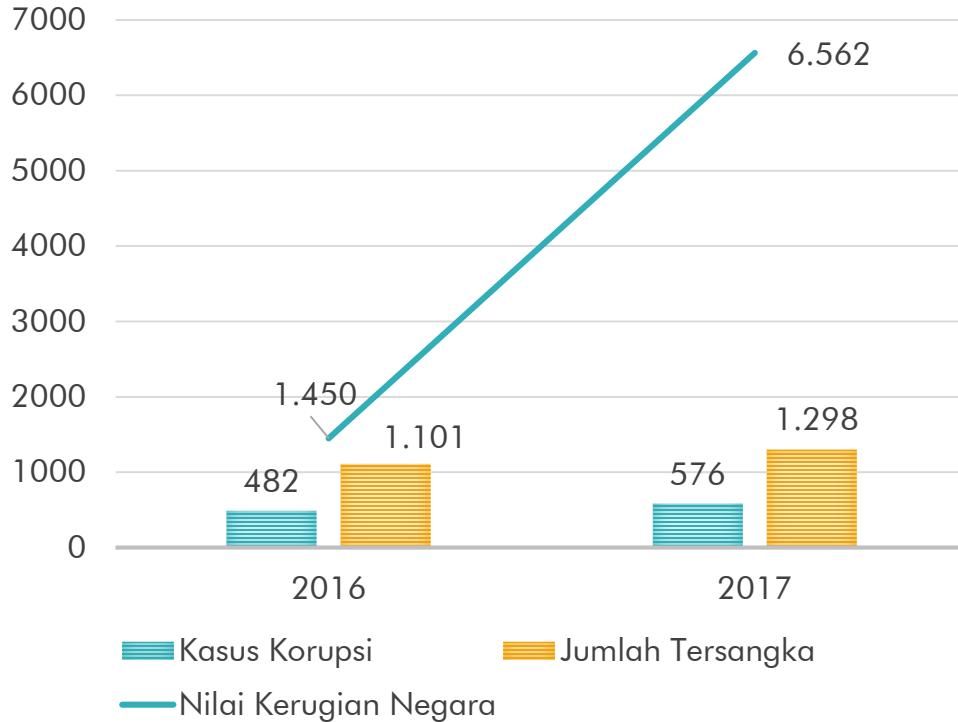
Melakukan analisis deskriptif atas penyidikan kasus korupsi.

Kinerja Penindakan Perkara Korupsi Tahun 2017



Perbandingan Penyidikan Kasus Korupsi

Tahun 2016 dan Tahun 2017



A

Adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi dari tahun 2016 ke tahun 2017.

B

Aktor yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum meningkat karena adanya penetapan tersangka baru di tahun 2017 seperti kasus KTP elektronik (KTP-el)

C

Nilai kerugian negara yang timbul meningkat signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Salah satu kasus yang nilai kerugian negaranya sangat besar adalah kasus dugaan korupsi pemberian kredit kapal oleh PT PANN dengan menimbulkan kerugian negara Rp 1,4 triliun



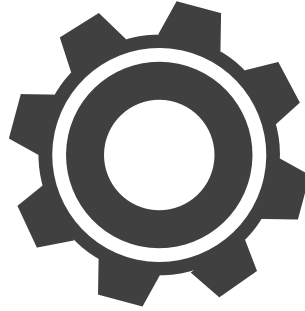
Pada tahun 2017 ICW mencatat dari 576 kasus korupsi yang berhasil disidik, 26 kasus diantaranya adalah pengembangan kasus yakni adanya tersangka baru yang ditetapkan oleh penegak hukum. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi KTP-el yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto.



10 Pengembangan Kasus Terbesar Tahun 2017

1. Kasus dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Yudi Widiana (Anggota DPR fraksi PKS) dan Musa Zainuddin (Anggota DPR fraksi PKB).
2. Kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (anggota DPR fraksi Golkar), Setya Novanto (ketua DPR fraksi Golkar), Anang Sugiana Sudiharja (swasta).
3. Kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Fahd A Rafiq (Ketua DPP Partai Golkar bidang Pemuda dan Olahraga).
4. Kasus dugaan suap pengadaan alat pemantau satelit di Bakamla dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Nofel Hasan (Ketua Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla).
5. Kasus dugaan suap jual beli jabatan di Klaten dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Bambang Teguh Setya (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dina Pendidikan Kabupaten Klaten) dan Sudirno (Sekretaris Dinas Pendidikan).
6. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat UPS di Jakarta dengan menetapkan tersangka baru yaitu, korporasi PT Offistarindo Adhiprima.
7. Kasus dugaan korupsi PDAU Sidoarjo dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Khoirul Huda (Anggota DPRD fraksi Golkar), Amral Soegianto (Direktur PDAU), Siti Winarni dan Umam Junaedy (swasta).
8. Kasus dugaan korupsi sejumlah kegiatan fiktif di Kementerian ESDM dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Sri Utami (Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara).
9. Kasus dugaan korupsi rapat fiktif di Kementerian Agama dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Iyan Sofyan (Kasubag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran).
10. Kasus dugaan korupsi pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2008-2013 dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Achmad Darmadi, Andang Ajiyoso, Parwoto Kristianto, Kondo dan Haedar (Kepala cabang BPD Papua di Kalimana Periode 2008-2013).

Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Modus



Penyalahgunaan Anggaran

Kasus Korupsi : 154 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 1,2 triliun

01

Mark Up

Kasus Korupsi : 77 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 1,8 triliun

02

Pungutan Liar

Kasus Korupsi : 71 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp -

03

Penyalahgunaan Wewenang

Kasus Korupsi : 61 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 2,3 triliun

04

Laporan Fiktif

Kasus Korupsi : 56 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 616 triliun

05

Kegiatan/Proyek Fiktif

Kasus Korupsi : 54 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 227 miliar

06

Modus korupsi yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi dan ditangani oleh penegak hukum adalah penyalahgunaan anggaran. Namun nilai kerugian negara paling besar terjadi pada modus penyalahgunaan wewenang. Salah satu kasusnya adalah pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta penyalahgunaan menyangkut ekspor nikel oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 630 miliar dan ditangani oleh Kejaksaan Agung.

07

Penggelapan

Kasus Korupsi : 44 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 187 miliar

08

Suap

Kasus Korupsi : 42 kasus
Nilai Suap : Rp 211 miliar

09

Penyunatan/Pemotongan

Kasus Korupsi : 10 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 3,9 miliar

10

Pemerasan

Kasus Korupsi : 3 kasus
Nilai Pemerasan : Rp 189 juta

11

Mark Down

Kasus Korupsi : 2 kasus
Nilai Kerugian Negara : Rp 41,7 miliar

Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Sektor (5 Terbanyak)



01

Anggaran Desa

Jumlah Kasus : 98 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 39,3 miliar

02

Pemerintahan

Jumlah Kasus : 55 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 255 miliar

03

Pendidikan

Jumlah Kasus : 53 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 81,8 miliar

04

Transportasi

Jumlah Kasus : 52 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 985 miliar

05

Sosial Kemasyarakatan

Jumlah Kasus : 40 kasus

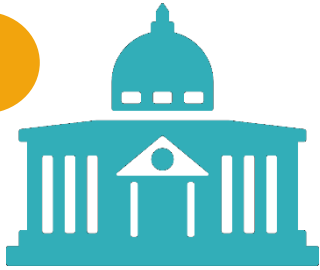
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 41,1 miliar



Sektor pengelolaan anggaran desa pada tahun 2017 sangat rawan dikorupsi. Ada sebanyak 98 kasus korupsi yang terkait dengan anggaran desa. Selain itu sektor pemerintahan menjadi peluang cukup besar untuk dikorupsi. Hal yang sama terjadi pada sektor pendidikan, transportasi dan sosial kemasyarakatan.

Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Lembaga (5 Terbanyak)

01



Pemerintah Kabupaten

Jumlah Kasus : 222 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 1,17 triliun

Jumlah Tersangka : 326 tersangka

02



Pemerintah Desa

Jumlah Kasus : 106 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 33,6 miliar

Jumlah Tersangka : 154 tersangka

03



Pemerintah Kota

Jumlah Kasus : 45 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 159 miliar

Jumlah Tersangka : 52 tersangka

04



BUMN

Jumlah Kasus : 23 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 2,8 triliun

Jumlah Tersangka : 51 tersangka

05



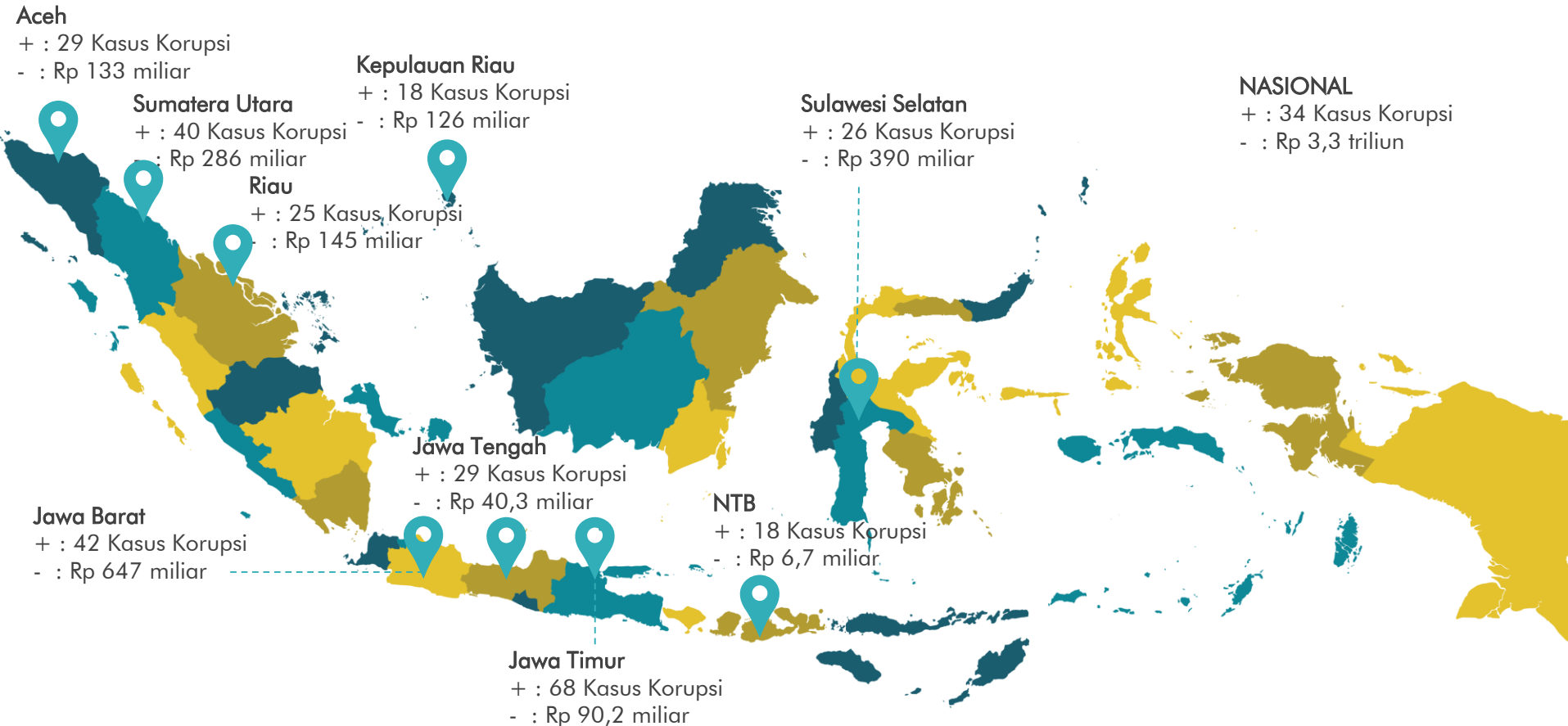
Kementerian

Jumlah Kasus : 19 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 710 miliar

Jumlah Tersangka : 19 tersangka

Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Provinsi (10 Terbanyak)





“ Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan nilai kerugian negara paling besar yaitu, Rp 647 miliar. Kasus korupsi dengan nilai kerugian negara paling besar di Jawa Barat adalah kasus dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di Bank Jabar (BJB) Syariah yang melibatkan Yocie Gusman selaku Plt Dirut BJB Syariah dengan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 628 miliar dan diproses oleh Bareskrim Polri. ”

Jumlah Aktor yang Ditetapkan Sebagai Tersangka (10 Terbanyak)



Aparatur Sipil
Negara (ASN)
495 tersangka



Swasta
241 tersangka



Kepala Desa
102 tersangka



Masyarakat
59 tersangka



Dirut atau karyawan
BUMN
50 tersangka



Ketua/Anggota
Organisasi/Kelompok
44 tersangka



Aparatus Desa
38 tersangka



Ketua/Anggota
DPRD
37 tersangka



Kepala Daerah
30 tersangka



Dirut atau karyawan
BUMD
30 tersangka



Aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi berasal dari ASN. Selain itu, ICW mencatat setidaknya ada 4 korporasi yang dijerat oleh penegak hukum pada tahun 2017. Salah satunya adalah PT Offistradinod Adhiprima terkait kasus dugaan pengadaan UPS di Pemda Jakarta.



Kepolisian
Jumlah Kasus Korupsi
216 kasus korupsi
Jumlah Tersangka
436 tersangka
Kerugian Negara
Rp 1,6 triliun
Nilai Suap
Rp 975 juta



Kejaksaan
Jumlah Kasus Korupsi
315 kasus korupsi
Jumlah Tersangka
730 tersangka
Kerugian Negara
Rp 4,4 triliun
Nilai Suap
Rp 21,8 miliar

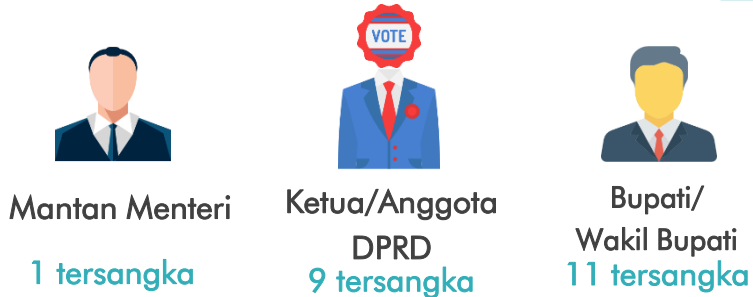
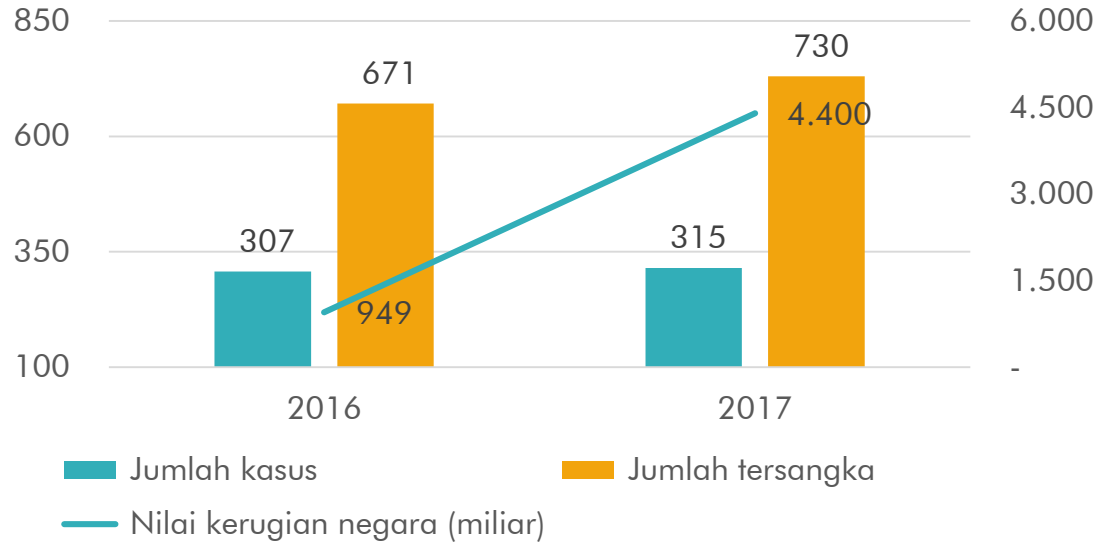


KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK
Jumlah Kasus Korupsi : 44 kasus korupsi
Jumlah Tersangka : 128 tersangka
Kerugian Negara : Rp 209,7 miliar
Nilai Suap : Rp 188,3 miliar

**Kinerja
Penyidikan
Aparat
Penegak
Hukum
Tahun 2017**

Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi di Kejaksaan Tahun 2017



Jampidsus

1 Kantor

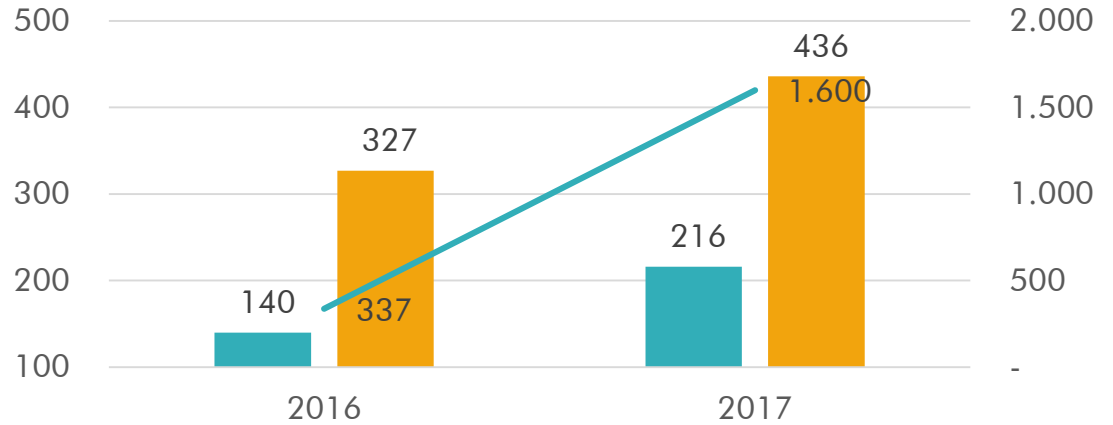
Kejaksaan
Tinggi

32 Kantor


Kejaksaan
Negeri

488 Kantor

Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi di Kepolisian Tahun 2017



■ Jumlah kasus
■ Jumlah tersangka
— Nilai kerugian negara (miliar)



Bupati/
Wakil Bupati
8 tersangka



Ketua/Anggota
DPRD
10 tersangka



Dirut/Karyawan
BUMN
14 tersangka

Bareskrim

1 Kantor

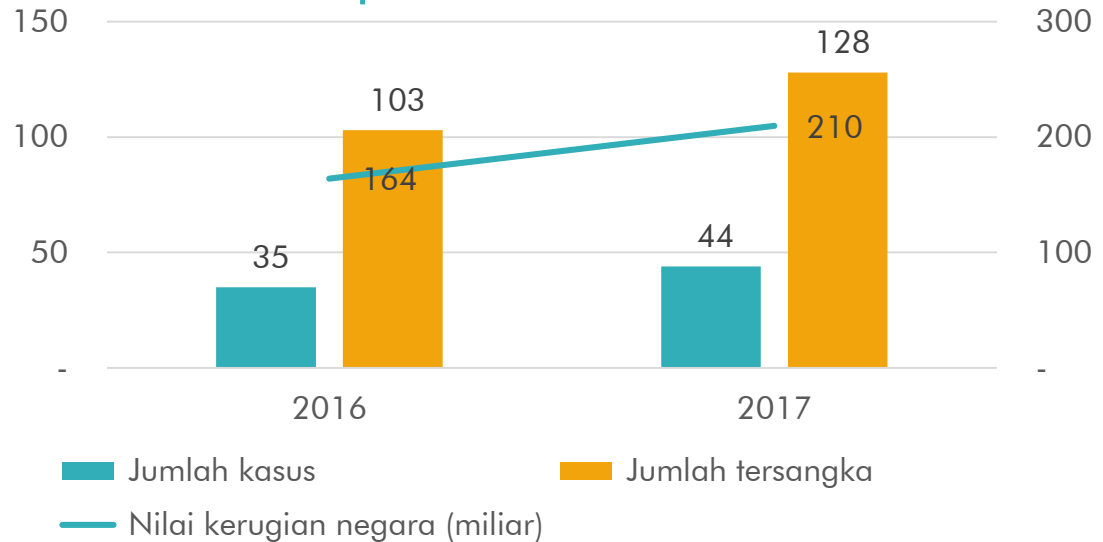
Kepolisian
Daerah

33 Kantor

Kepolisian
Resor

502 Kantor

Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi di KPK Tahun 2017



**Anggota Hakim
Mahkamah
Konstitusi**
1 tersangka



**Ketua/Anggota
DPR**
6 tersangka

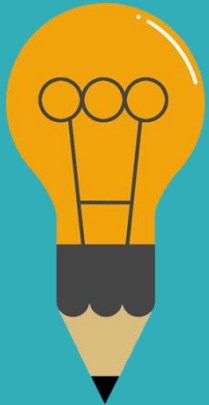


**Kepala
Daerah**
11 tersangka

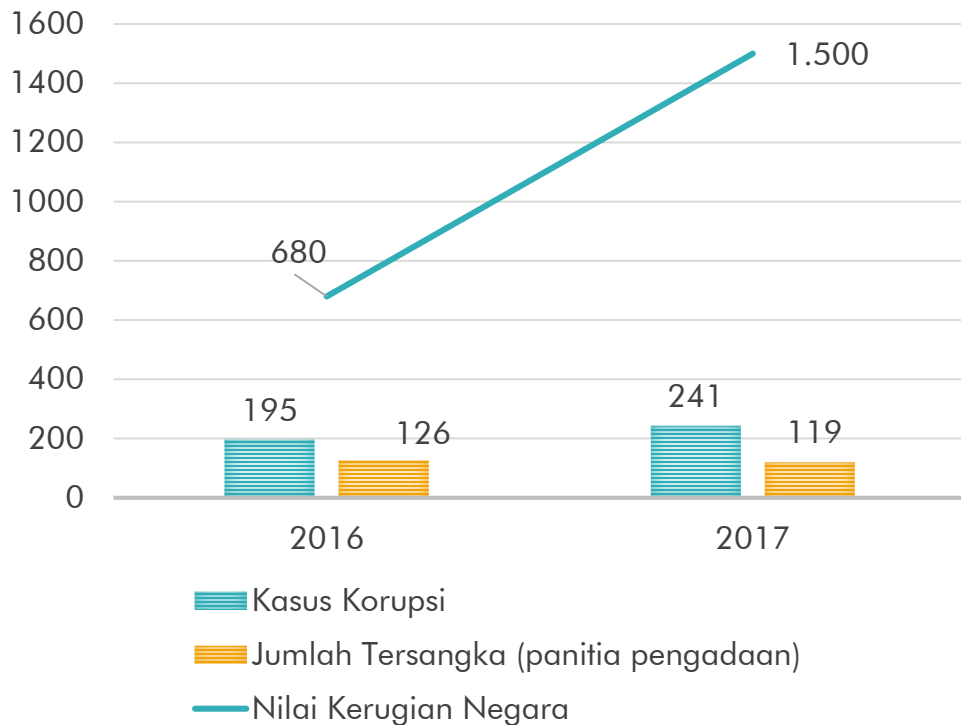
Berdasarkan pemantauan yang telah ICW lakukan sepanjang tahun 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 18 kasus. Pada tahun 2016 OTT yang dilakukan KPK sebanyak 17 kasus. Hal ini merupakan pencapaian dari segi kuantitas.

Secara kualitas, tahun 2017 KPK menangkap tangkap Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Selain itu KPK juga berhasil menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP-el. Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi antara lain Wali Kota sebanyak 5 orang, Bupati sebanyak 5 orang dan Gubernur sebanyak 1 orang

Tren Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017



TREN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2016-2017



A

Tahun 2016 ada sekitar 41 persen kasus korupsi terkait dengan PBJ dari jumlah korupsi yang ditangani. Sedangkan tahun 2017 ada sekitar 42 persen kasus korupsi terkait PBJ.

B

Jumlah tersangka yang bertanggung jawab dalam PBJ berkurang dari tahun 2016 ke tahun 2017.

C

Nilai kerugian negara akibat korupsi PBJ meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Salah kasusnya yaitu pengadaan helikopter AW-101 yang disidik oleh Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 220 miliar.

Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara /suap
1	Penyalahgunaan anggaran	67 kasus	Rp 266 miliar
2	Mark up	60 kasus	Rp 496 miliar
3	Kegiatan/proyek fiktif	33 kasus	Rp 182 miliar
4	Penyalahgunaan wewenang	26 kasus	Rp 440 miliar
5	Laporan fiktif	21 kasus	Rp 140 miliar
6	Penggelapan	16 kasus	Rp Rp 34,2 miliar
7	Suap	13 kasus	Rp 33,7 miliar
9	Penyunatan/ Pemotongan	2 kasus	Rp 132 juta
10	Pemerasan	1 kasus	-
11	Pungutan liar	1 kasus	-
	TOTAL	241 kasus	Rp 1,5 triliun

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1	Transportasi	46 kasus	Rp 912 miliar
2	Anggaran Desa	27 kasus	Rp 20 miliar
3	Pendidikan	25 kasus	Rp 61,1 miliar
4	Pemerintahan	20 kasus	Rp 89,4 miliar
5	Kesehatan	18 kasus	Rp 51 miliar

Pelayanan publik menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi. Pengadaan barang yang secara periodik dianggarkan oleh pemerintah menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Selain itu seringkali pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan yang mengakibatkan barang tidak digunakan.

Sektor Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa



Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, institusi penegak hukum pada tahun 2017 berhasil menetapkan sebanyak empat korporasi sebagai pelaku korupsi berkaitan dengan PBJ. Pelakunya antara lain PT Karya Putra Tunggal Jaya (dugaan korupsi pembangunan pompa air-Kejaksaan), CV Devasindo Utama (dugaan korupsi pembangunan irigasi di Desa Mangkurajo-Kejaksaan), PT Duta Graha Indah (dugaan korupsi pembangunan rumah sakit pendidikan khusus infeksi di Universitas Udayana-KPK), dan PT Offistarindo Adhiprima (dugaan pengadaan alat UPS di Jakarta).



Bupati

1 tersangka



Walikota

2 tersangka

” Dari 30 orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, tiga diantaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah yang tertangkap antara lain Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno (pengadaan instalasi kesehatan di RSUD Kardinah Tegal); Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (pengadaan meubelair di Pemkot Batu); dan Mantan Bupati Sorong Selatan (Sorsel), Otto Ihalauw (pengadaan kapal kargo). Dua Wali Kota yang terjerat kasus korupsi tertangkap tangan oleh KPK. Diduga uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan Pilkada.

Sedangkan Mantan Bupati Sorsel ditangani oleh Polda Papua Barat dan dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

”

01

Penindakan kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa meningkat dari tahun 2016 ke 2017 baik dari sisi kasus maupun kerugian negara namun dari sisi jumlah aktor menurun.

02

Nilai kerugian negara paling besar yang ditimbulkan terkait dengan pengadaan barang dan jasa ialah kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 yang disidik oleh Puspom TNI sekitar Rp 220 miliar.

03

Penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang sering dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, disusul dengan modus *mark up*, dan kegiatan/proyek fiktif.

04

Sektor yang paling banyak dikorupsi dalam pengadaan barang dan jasa ialah terkait dengan pelayanan publik.

05

Ada sebanyak empat korporasi yang dijerat oleh penegak hukum pasca terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

06

Ada sebanyak tiga kepala daerah yang dijerat oleh penegak hukum, dua diantaranya tertangkap tangan oleh KPK. Diduga uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan Pilkada.

KESIMPULAN

REKOMENDASI

Institusi penegak hukum perlu meningkatkan kinerja penindakan korupsi terutama dalam hal PBJ dan juga menindak aktor utama yang mendapatkan keuntungan dari PBJ yang dilaksanakan.

01

Institusi penegak hukum dan LKPP perlu menjalin kolaborasi secara aktif dengan Puspom TNI khususnya terkait dengan korupsi pengadaan di sektor pertahanan.

02

Pemerintah bersama dengan LKPP perlu mengoptimalkan penggunaan *e-catalog*, *e-purchasing* untuk meminimalisir terjadinya potensi korupsi mulai dari tahap perencanaan. Pemerintah perlu juga untuk melaksanakan *open contracting* agar masyarakat dapat memantau setiap pengadaan yang dilaksanakan.

03

Setiap K/L/D/I harus mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP bila ditemukan adanya potensi pelanggaran atau kerugian negara yang ditimbulkan terkait dengan PBJ.

04

Institusi penegak hukum perlu menerapkan pengenaan pasal pencucian uang bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar aset yang dimiliki dapat dirampas dan dikembalikan ke negara.

05

Perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam membina kepala daerah agar tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi. KPK pun perlu melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan terhadap daerah yang kepala daerahnya pernah terjerat kasus korupsi.

06



Terima kasih



2018